

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rizki Sridadi, 2016, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*, Malang: Empatdua Media.
- Bagus Sarnawa, Johan Erwin I, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dadang Budiaji, 2007, *Modul Diklat Konsultan Hukum Perusahaan*, Bandung: Yayasan Cipta Bangsa.
- E.St. Harahap, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Edi Suharto, 2009, *Pekerja Sosial di Dunia Industri*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Hendra Winarti, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Soepomo, 1995, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
- Lalu Husni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sendjun H. Manulang. 1988, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sendjun Manulang, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sumanto, 2013, *Hubungan Industrial, Memahami dan Mengatasi Konflik Kepentingan Pengusaha Pekerja Pada Era Modal Global*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Zaeni Asyhadie, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 2016, Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial Dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*. Volume 2. Nomor 2. (Juli 2016).

Akbar Pradima. “Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9. Nomor 17 (Februari 2013).

Ardiantha Putera Sembiring Budiman Ginting, Agusmidah, Mahmud Siregar, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Mengundurkan Diri”. *Jurnal USU Law*. Volume 3. Nomor 1. (April 2015).

Debby Novalita W. “Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Melalui Konsiliasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT Jarsindo Karya Utama di Kabupaten Siak”. *Jurnal JOM*. Volume 3. Nomor 2. (Oktober 2016).

Dahlia, Agatha Jumiati. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004”. *Jurnal Wacana Hukum*. Volume 9. Nomor 2. (Oktober 2011).

Krista Yitawati. “ Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 3. Nomor 2. (Maret 2017).

Maswandi. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial”. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 5. Nomor 1. (Juni 2017)

Mila Karmila Adi. “Implikasi Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial”. *Jurnal Hukum*. Volume 11. Nomor 27 (September 2004).

Suprihatmi Sri Wardiningsih. “Strategi Pengelolaan Hubungan Industrial Dalam Meminimisasi Konflik Industri”. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Volume 11. Nomor 1. (April 2011)

Ujang Charda S. “Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004”, *Jurnal Wawasan Yuridika*. Volume 1. Nomor 1. (Maret 2017).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/Xi/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi.